

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri tersebut menjelaskan siklus keuangan daerah mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta akuntansi dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Selain itu juga disajikan sistem dan prosedur keuangan daerah beserta contoh-contoh formulir yang bisa digunakan oleh pemda baik secara manual maupun terkomputerisasi (*computerized*). Penyajian laporan keuangan dalam permendagri ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). BPKP dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah memberikan respon positif atas terbitnya permendagri ini, dengan menyusun suatu program aplikasi yang dapat digunakan oleh pemda dalam rangka pengelolaan keuangan daerahnya.

Menurut Djaja (2009) aplikasi SIMDA adalah sebagai aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dimana tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk mempercepat proses reformasi pengelolaan keuangan daerah. Tujuan pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah ini adalah:

1. Menyediakan Data base mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatatur daerah maupun

pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.

2. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.
3. Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik.
4. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Salah satu penerapan kemajuan teknologi informasi dalam mendukung proses pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel maka Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah memfasilitasi pemerintah dengan aplikasi SIMDA dengan harapan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabilitas dan transparan. SIMDA merupakan paket terintegrasi dari pemerintah daerah. Untuk mempercepat penyusunan APBD, pelaksanaannya dan penyusunan laporan keuangan. Dalam setiap pemeriksaan keuangan yang dilakukan, BPK mengeluarkan pernyataan atau kesimpulan yang disebut opini. Opini merupakan pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini ini didasarkan pada kriteria antara lain :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Interen.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/unqualified opinion*) yaitu Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified opinion*) Opini WDP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan pemeriksa atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.
3. Tidak Wajar (*TW/Adverse opinion*) Opini TW diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.
4. Tidak Memberikan Pendapat (*TMP/Disclaimer opinion*) Adapun opini TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak

dapat diyakini pemeriksa karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga pemeriksa tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian, pemeriksa tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, pemeriksa tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini, pemeriksa tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.

Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

Tabel. 1.1
Data Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Rokan Hulu

No	Tahun	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI
1	2011	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011.
2	2012	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Rokan Hulu TA 2012.
3	2013	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP – DPP) atas LKPD Kabupaten Rokan Hulu TA 2013.
4	2014	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2014.
5	2015	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Rokan Hulu TA 2015.

Sumber : Kasubag Humas dan TU BPK Perwakilan Provinsi Riau

Pada tabel 1.1 dapat dilihat Data hasil pemeriksaan laporan keuangan Kabupaten Rokan Hulu Dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Dapat dilihat pada tahun 2011 hasil pemeriksaan laporan keuangan Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan hasil WDP . Pada tahun 2012 hasil pemeriksaan laporan keuangan Kabupaten Rokan Hulu kembali mendapatkan hasil WDP . Dan untuk tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan hasil yang sangat membanggakan dengan hasil pemeriksaan oleh BPK-RI yaitu mendapatkan hasil WTP. Pada tahun 2014 kembali mendapatkan hasil pemeriksaan laporan keuangan dari BPK-RI dengan Hasil WTP dan Pada Tahun 2015 hasil pemeriksaan laporan Keuangan Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan yaitu mendapatkan hasil WDP.

Dari keterangan-keterangan yang sudah diuraikan di atas, maka dalam rangka untuk memahami permasalahan yang terkait dengan masalah hasil laporan keuangan Kabupaten Rokan Hulu dan Sistem informasi di daerah kabupaten Rokan Hulu, maka penulis melakukan Penelitian terhadap sistem informasi manajemen keuangan bagi pemerintah daerah. Kemudian penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan manajemen keuangan yang telah dilakukan selama ini dengan mengambil judul, *“Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu “*.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan Aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti mengenai Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah
 - b. Sebagai wahana bagi peneliti untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari serta, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, saran dan masukan bagi SKPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten

Rokan Hulu dalam rangka mengoptimalkan penerapan sistem informasi manajemen daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori yang mendasari dalam penelitian ini, Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, dan Hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas tentang lokasi penelitian, Jenis dan sumber data, Populasi dan sampel, Teknik dalam pengumpulan data, Defenisi operasional, Instrument penelitian, dan Analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang analisa data, yang merupakan analisa penelitian yang membahas hasil pengumpulan data, pengolahan data, pengujian hipotesis dan penjelasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari seluruh pembahasan sebelumnya, dan saran sesuai hasil pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKAN PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian SIMDA

Sistem informasi manajemen (*management information system*) didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Para pengguna SIM biasanya terdiri atas entitas-entitas organisasi formal, perusahaan atau sub-unit anak perusahaannya. Informasi yang diberikan oleh SIM menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya dilihat dari apa yang telah terjadi dimasa lalu, apa yang sedang terjadi, dan apa yang kemungkinan akan terjadi dimasa depan (Raymond Mcleod dan Jr.Geogre P.Schell,2009:12).

Sistem informasi dilakukan melalui tujuh tahapan yaitu : pengumpulan data, klasifikasi data, pengolahan data supaya berubah bentuk,sifat dan kegunaanya menjadi informasi, interpretasi informasi, penyimpanan informasi, penyampaian informasi atau transmisi kepada pengguna, dan penggunaan informasi untuk kepentingan manajemen organisasi (Prof.Dr.Sondang P.Siagian,M.P.A,2014:2).

Sistem Informasi Manajemen dibentuk oleh tiga kata,sistem,informasi,manajemen menurut sutantan (2003:3) sistem adalah sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling kerjasama

atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan.

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan.

2.1.2 Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA (BPKP, 2008) adalah :

- a. Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima koneksitas jaringan SIMDA;
- b. Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan webcam bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA;
- c. Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya;
- d. Sebagai media awal bagi pelaksanaan e-governemen
- e. Sebagai sarana untuk pelaksanaan good government.

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan daerah terintegrasi (BPKP, 2008) adalah sebagai berikut :

- a. Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama;
- b. Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin); dan
- c. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana:
 1. Output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan
 2. Output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/ kebijakan.

2.1.3 Klasifikasi SIMDA

SIMDA dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan (BPKP, 2008), yaitu :

1. Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan;
2. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/badan/lembaga sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah; dan
3. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing- msing dinas/ lembaga

2.1.4 Unsur SIMDA

Kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari empat lapis struktur (BPKP,2008),

- a. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi, lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik;

- b. Portal, pelayanan publik, situs web pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait;
- c. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik;
- d. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

2.1.5 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan

Program aplikasi komputer SIMDA keuangan (BPKP,2008) adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemda dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.

2.1.6 Fungsi Program Aplikasi Simda Keuangan, Keunggulan dan Manfaat SIMDA Keuangan

Fungsi utama pengimplementasian SIMDA Keuangan adalah (BPKP,2008) :

1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban)
2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat;
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya;
4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan; dan
5. Mempermudah proses audit bagi Auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi Electronic Data Processing (EDP) audit.

Keunggulan atau nilai tambah yang ditawarkan oleh SIMDA Keuangan adalah:

1. Output/Laporan disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan.
2. Berbasis windows.
3. Validasi Inputan data lebih terjamin.
4. Terdapat menuotoritas dan unit otoritas.
5. Memfasilitasi setiap fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus melakukan pencatatan akuntansi; dan
6. Memfasilitasi akuntansi pengguna anggaran

Selain manfaat di bidang pengelolaan keuangan daerah, berikut adalah manfaat lain yang terintegrasi dalam pemanfaatan SIMDA, diantaranya:

- a. Sesuai Peraturan. Dengan menerapkan aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah secara otomatis telah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah karena aplikasi SIMDA Keuangan dikembangkan atas dasar kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
- b. Kesenambungan Maintenance. Dengan lokasi BPKP yang ada di setiap ibukota provinsi, maka pemeliharaan sistem dapat dilakukan secara berkesinambungan dan optimal.
- c. Transfer of Knowledge. Poin yang paling penting dari penerapan sistem ini adalah adanya transfer pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah bagi aparat daerah setempat, tidak hanya masalah operasional sistem saja. Selain itu, proses asistensi yang dilaksanakan oleh BPKP dalam kaitannya dengan penerapan aplikasi SIMDA di suatu daerah diorientasikan “satu kali untuk selamanya.”
- d. Terintegrasi. SIMDA merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu, penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. SIMDA juga mengintegrasikan antara proses transaksi keuangan yang terjadi dengan proses penjurnalannya secara otomatis. Sehingga, setiap transaksi keuangan yang terjadi, dapat langsung dilihat jurnal atas transaksi tersebut hingga pelaporannya pada waktu yang bersamaan.

2.1.7 Pembiayaan Penerapan SIMDA Keuangan

Biaya yang dikenakan terhadap atas program aplikasi SIMDA ini dapat dikatakan gratis atau tanpa biaya. Jika dibandingkan dengan program aplikasilainnya, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat mencapai ratusan juta hingga milyaran, tergantung pada jumlah komputer pengguna yang ingin dipasang program tersebut. Hal inilah yang membuat SIMDA menjadi pilihan utama berbagai pemerintah daerah di Indonesia untuk dijadikan sebagai basis sistem informasi keuangannya.

Pembiayaan yang dikeluarkan untuk penerapan SIMDA (BPKP,2008), hanya dibutuhkan untuk alokasi tenaga asistensi dan proses-proses pelatihan yang nantinya bermanfaat bagi pemerintah daerah itu sendiri. Besaran jumlah dana yang dibutuhkan untuk proses asistensi implementasi ataupun pendidikan dan pelatihan SIMDA ini, bergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing pemerintah daerah. Artinya, setiap pemerintah daerah tidak akan dibebankan biaya yang melampaui kemampuan keuangannya.

2.1.8 Peraturan Pemerintah Daerah Terkait SIMDA

Dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (BPKP:2011), memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menuju terwujudnya good goverment.

2.1.9 Kualitas Laporan Keuangan SKPD

Halim Abdul (2007) menyatakan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di mana dalam peraturan tersebut dijelaskan pengertian Keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Atas peranan laporan keuangan pemerintah tersebut, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya ditujukan agar dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan cara sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
7. Dengan ketersediaan informasi-informasi tersebut, maka diharapkan Laporan keuangan pemerintah juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, artinya dapat menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasi yang berkelanjutan, risiko dan ketidakpastian yang terkait, serta dapat menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran. Selain itu juga untuk mengetahui apakah apakah sumber daya diperoleh dan digunakan telah sesuai dengan ketentuan, termasuk kepatuhan terhadap batas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan adalah:

- Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
- Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.
- Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

- Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

- Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda.

- Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dalam kenyataannya, pemerintah masih menghadapi beberapa kendala kendala dalam menyajikan informasi yang relevan dan andal tersebut. Kendala tersebut merupakan suatu keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam penyajian laporan keuangan pemerintah tersebut, yaitu:

a. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

Selama seluruh informasi yang material telah disajikan dalam laporan keuangan maka laporan keuangan pemerintah tersebut dapat dikatakan wajar. Hal inilah yang mengakibatkan mungkin saja ada suatu informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

b. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi akuntansi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Dampak dari pertimbangan biaya dan manfaat tersebut, laporan keuangan pemerintah diperbolehkan untuk tidak menyajikan segala informasi, apalagi jika informasi tersebut manfaatnya lebih kecil daripada biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi atas biaya dan manfaat membutuhkan proses pertimbangan yang matang. Biaya penyajian informasi tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat, karena manfaat dari penyajian informasi tersebut mungkin saja dinikmati oleh pengguna lain di luar mereka yang menjadi tujuan informasi.

c. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif yang diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Bisa saja untuk mementingkan dipenuhinya keandalan suatu informasi, menyebabkan informasi tersebut kurang relevan, begitupula sebaliknya jika relevansinya dipentingkan, mengakibatkan informasi tersebut kurang andal.

Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus mungkin akan berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan, adakalanya pengguna lebih membutuhkan informasi yang andal dibandingkan informasi yang relevan, namun bisa saja pengguna lebih mementingkan kerelavansian dari pada keandalannya. Untuk itu, dibutuhkan suatu pertimbangan profesional dalam penentuan tingkat

kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut agar dapat menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna

Salah satu misi dalam penerapan SIMDA ialah meningkatkan kinerja pengelola keuangan di tiap-tiap SKPD dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari segala tindakan yang menjurus ke arah kolusi korupsi dan nepotisme.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan referensi dan perbandingan, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Devita Wulandari Darea (2015) dengan judul “Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangehe” menggunakan Metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya SIMDA Keuangan proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih cepat, tepat, dan akurat. Proses penyajian dan penerapannya sudah terorganisir dengan baik. Pimpinan DPPKA sebaiknya melakukan penambahan fungsi Administrator mengingat jumlah SKPD yang cukup banyak, melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada bendahara setiap SKPD yang belum mengetahui cara penggunaan SIMDA agar meningkatkan akurasi dalam penyusunan APBD berbasis kinerja.
2. Penelitian yang dilakukan Harmadhani Adi Nugraha (2013), dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA KEUANGAN) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi

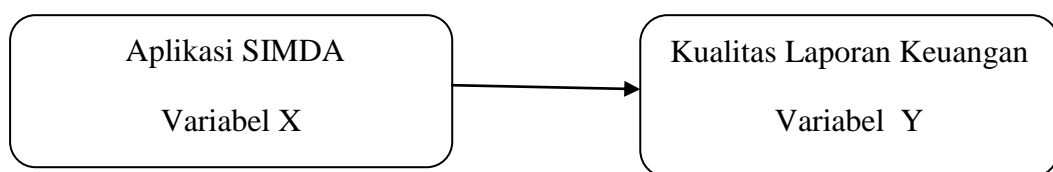
Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk)”. Hasil penelitian ini adalah hasil evaluasi penilaian kriteria akurat menunjukkan kenaikan rata-rata tertimbang sebesar 50,78 % hal ini menunjukkan bahwa aplikasi SIMDA Keuangan mampu menghasilkan informasi dengan ketepatan atau tingkat kebenaran yang lebih baik bila dibandingkan dengan pengolahan data manual.

3. Penelitian yang dilakukan Ririn Tegela dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang berada Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dari kusioner. Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang kabag Keuangan, 1 orang subbagian Anggaran, 1 orang subbagian Perbendaharaan, dan 1 orang subbagian akuntansi yang berjumlah 104 orang. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Hasil estimasi model persamaan regresi diperoleh koefisien determinasi R^2 sebesar 0.431, yang berarti 43,1% kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dipengaruhi oleh sistem informasi manajemen daerah (SIMDA).

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berisi tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah penting.

Dalam penelitian ini gambaran kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diteliti, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, maka penulis mengambil hipotesis ; **“Diduga Terdapat Pengaruh Penerapan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu”**.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

3.2 Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2012:115). Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah 43 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016.

b. Sampel

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,2012:122). Adapun pertimbangan sampel yang akan digunakan yaitu 1 (satu) orang dari setiap SKPD di Kabupaten Rokan Hulu dari bidang keuangan per SKPD yang mengetahui dan memahami tentang penggunaan SIMDA dalam pengelolaan laporan keuangan dalam hal ini ditetapkan yang

mengetahui dan memahami adalah bendahara keuangan dari setiap SKPD di Kabupaten Rokan Hulu.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data Kuantitatif Merupakan data yang terdiri dari kumpulan bentuk angka yang diasumsikan sebagai informasi dalam bentuk pernyataan bilangan yang didasarkan pada hasil perhitungan.

2. Sumber Data

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data Primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pernyataan penelitian yang diperoleh melalui Teknik Kuisisioner.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian kepustakaan (Library research) yaitu penelitian dengan cara membaca dan mempelajari literatur seperti buku-buku, jurnal dan berbagai macam sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan diteliti.
2. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk menjawabnya.

3.5 Defenisi Operasional Variabel

Ada dua jenis variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu variabel independen atau bebas (X) yaitu variabel yang menjadi pendugaan sedangkan variabel dependen atau tidak bebas (Y) yaitu variabel yang diperkirakan nilainya.

Tabel 3.1

Indikator Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

No	Variabel	Indikator
1.	Aplikasi SIMDA (X)	1. Bukti Fisik 2. Kelengkapan isi 3. Fleksibilitas 4. Kemudahan penggunaan aplikasi (Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP))
2.	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami (Sumber : Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP))

3.6 Instrument Penelitian

3.6.1 Skala Pengukuran Data

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi dari individu atau kelompok tentang fenomena sosial. Fenomena sosial ini disebut variabel penelitian yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Jawaban dari setiap instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata antara lain : sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju ; selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk centang (*checklist*) ataupun pilihan ganda.

Tabel .3.2
Skor Klasifikasi Jawaban

No	Klasifikasi Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Ragu-ragu	3
4	Kurang Setuju	2
5	Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono, 2012

3.6.2 Pengolahan Jawaban Responden

Perhitungan atas hasil kuesioner dapat dilakukan secara manual yaitu:

$$\text{Persentase Jumlah Responden} = \frac{\text{Jumlah Jawaban Responden}}{\text{Total Jawaban Responden}} \times 100\%$$

3.6.3 Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa yang seharusnya diukur. Apabila titik signifikan lebih dari 0.05 berarti valid dan jika kurang dari 0.05 berarti tidak valid. Cara menguji validitas kuesioner dilakukan dengan skor total dilihat dari tabel kolom data masing-masing pertanyaan dengan skor total dilihat dari tabel kolom *corrected item-total correlation* pada tabel *item-total statistics* (Sofian Siregar,2015:87).

3.6.4 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukuran. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan one shot atau pengukuran sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau pengukuran korelasi antar jawaban pertanyaan.

Uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan SPSS yang merupakan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik alpha cronbach (α) suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki alpha cronbach > 0.6 (Sofian Siregar,2015:87)

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis ini menggunakan analisis regresi linier sederhana di gunakan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas (Aplikasi SIMDA) dan variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan), Formulasi persamaan regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y=a+bx$$

Dimana :

Y : Varibel Terikat

X : Variabel Bebas

a dan b : Konstanta

(Sumber : Sugiyono, 2012)

3.7.2 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Y) secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah.

Tabel 3.3

Interpretasi Koefisien Korelasi

No	Interpretasi Koefisien Korelasi	Keterangan
1	0,00-0,199	Sangat Rendah
2	0,20-0,399	Rendah
3	0,40-0,599	Sedang
4	0,60-0,799	Kuat
5	0,80-1,00	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2012)

3.7.3 Uji t Secara Parsial

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan menentukan nilai t-hitung dari hasil pengolahan data melalui aplikasi spss dilihat dari tabel coefficients.

Untuk menentukan nilai t_{tabel} ditentukan taraf signifikan 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-1)$ dimana n adalah jumlah sampel. Perumusan hipotesis statistik:

$$H_0 : \beta = 0$$

$$H_a : \beta \neq 0$$

Dasar keputusan uji:

Jika $t_{\text{hitung}} \geq t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima

Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak